



Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sept Okt Nov Des

2018

Hal.: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Tuntaskan Soal Aset

PONTIANAK, TRIBUN - Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Siska Marleni mengungkapkan persoalan aset yang belum tuntas terjadi di seluruh Indonesia. Masalah aset menjadi satu di antara temuan paling sering yang didapatkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

"Ini harus segera dituntaskan. DPD RI memberikan tenggat waktu selama 60 hari kepada seluruh Pemerintah Provinsi se-Indonesia untuk menyelesaikan persoalan aset di daerah masing-masing," ungkapnya usai kunjungan kerja dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan II Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) 2017 di Balai Petith Gubernur Kalbar, Senin (14/5).

Pemberian tenggat waktu selama 60 hari yang harus dimaksimalkan dalam upaya tindak lanjut temuan BPK RI, kata Siska, merupakan tolak ukur melihat komitmen para kepala daerah untuk menuntaskannya.

"Jika 60 hari itu tidak digunakan secara baik. Maka, akan timbul hal-hal yang lain. Tentunya akan menghambat pemerintah daerah dalam menyelesaikan temuan," katanya.

Ia menimpali aspirasi daerah sudah disampaikan ke pusat terutama tentang manajemen aset. Ia mengakui Komite IV DPD

RI mencatat beberapa hal terkait problem aset di Kalbar.

"Regulasinya akan direvisi di tingkat pusat. Seperti kekosongan manajemen aset yang terus menjadi momok bagi pemerintah daerah dalam kelancaran pelaporan keuangan dan asetnya," tandasnya. (pra)

